

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Masalah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam sosial keagamaan yang berperan penting dalam proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan merupakan *area of concern* organisasi ini sejak didirikan bahkan sebelum didirikan oleh pendirinya. Organisasi ini berperan penting dan terlibat langsung dalam proses eksperimentasi pendidikan Islam modern pada awal abad kedua puluh. *Tajdīd* dan *ijtihād*, dua tema penting yang diusung dalam setiap gerakan sosial keagamaan yang dilancarkannya. Melalui identitas ini Muhammadiyah merumuskan dan mengimplementasikan program-program sosial yang mencirikannya sebagai gerakan Islam modern. Selain memodernisasi pendidikan Islam, Muhammadiyah juga telah memprakarsai aktivitas sosial baru dalam gerakan Islam dalam bentuk pembangunan dan pendirian panti-panti sosial, rumah sakit dan balai pengobatan sebagai bentuk penafsiran dan aktualisasi terhadap ajaran Islam. Dengan tema dan identitas seperti itu, Muhammadiyah dipandang sebagai pendorong gerakan reformis yang cukup berpengaruh dalam konteks pembaruan Islam di Tanah Air.

Tokoh penting dibalik pendirian organisasi ini adalah KH. Ahmad Dahlan, sosok terpelajar muslim yang mengecap pendidikan tradisional.<sup>1</sup> Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal Barat akan tetapi Dahlan bersentuhan langsung dengan pendidikan Belanda pada saat menjadi tenaga pengajar di sekolah *Kweekschool*

---

<sup>1</sup>Dahlan tidak memiliki latar belakang pendidikan Barat, menginjak usia sekolah Dahlan diasuh dan dididik mengaji Alquran dan dasar-dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya sendiri di rumah, Djarnawi Hadikusuma, *Dari Jamaluddin al-Afghani sampai KHA. Dahlan* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), h. 74. Selanjutnya Dahlan belajar fiqh kepada KH. Muhammad Shaleh, dan belajar Nahwu kepada KH. Muhsin, keduanya merupakan kakak iparnya. Pada tahun 1890 M Dahlan berangkat haji yang mengantarkannya bertemu dengan ulama-ulama besar Indonesia di Mekkah antara lain KH. Muhammad Nawawi berasal dari Banten, KH. Mahfud dari Termas, KH. Nahrawi dari Banyumas, dan juga bertemu dengan para ulama asli Arab di Masjidil Haram yang menghasilkan berbagai syahadah (ijazah). Musthafa Kamal Pasha, Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 103. Sekembalinya dari Mekkah tahun 1891, ia diminta oleh ayahnya (KH. Abu Bakar) mengajar para santri, namun lima tahun setelah itu ayahnya meninggal dunia (1896), kemudian Kraton Yogya mengangkat beliau sebagai Ketib Amin di mesjid Gedhe Kauman menggantikan posisi ayahnya. Karaton juga mengangkat beliau sebagai *Raad* agama Islam Hukum Kraton Yogyakarta, dan juga bertugas memakmurkan mesjid. Usaha untuk meningkatkan wawasan keilmuan, Dahlan kembali ke Mekkah untuk kedua kalinya dan bermukim selama dua tahun. Selama di Mekkah Dahlan banyak belajar dan menimba ilmu pengetahuan kepada para ulama Timur Tengah. Selain itu Dahlan juga sering berdiskusi tentang nasib umat Islam di Tanah Air kepada para ulama Indonesia yang bermukim di Tanah Suci. Proses tukar pikiran ini ia lakukan dengan intelektual *mukimin* ternama yang kemudian disebut-sebut sebagai gurunya seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, Kyai Nawawi dari Banten, dan KH. Fakhri dari Maskumambang Gresik, UMY *Mewujudkan Cita Menggapai Asa* (Yogyakarta: UMY Press, 2010), h. 10.

*Gubernemen* Jetis Yogyakarta dan pada saat mengajarkan Agama Islam pada OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsch Ambtenaar*) yaitu Sekolah Pamong Praja di Magelang.<sup>2</sup> Sebagai muslim terpelajar, pengalaman dan intelektualitas Dahlan diperkaya oleh berbagai pihak. Dalam bidang organisasi Dahlan pernah berkiprah dalam organisasi Budi Utomo, dan pernah tercatat sebagai anggota. Organisasi ini didirikan oleh kalangan terpelajar Indonesia yang terdiri dari aristokrat Jawa dan pegawai pemerintah Belanda. Selain itu Dahlan juga tercatat sebagai anggota di organisasi Jamiatul Khair yang berdiri pada Tahun 1905. Sebuah organisasi muslim reformis yang diprakarsai oleh masyarakat keturunan Arab di Indonesia.<sup>3</sup> Sehingga menurut Arief, posisi organisasi ini sangat strategis dalam proses transmisi ide-ide pembaharuan Islam, melalui guru-guru yang diundang dari Timur Tengah.<sup>4</sup> Interaksi Dahlan dengan berbagai organisasi ini diduga sangat kuat mempengaruhi wawasan dan pemikiran keagamaan Dahlan yang bercorak reformis.

Oleh karena itu, tidak sulit menghubungkan jika kemudian corak pemikiran seperti itu mengilhami pemikiran yang berkembang di Muhammadiyah. Kenyataan membuktikan bahwa agenda perjuangan yang dicanangkan organisasi ini sejalan dengan gagasan-gagasan modernisasi Islam yang berkembang di dunia Islam. Perpaduan antara gerakan pemurnian (*purification*) dengan tema *ruju' ila Alquran wa al sunnah*, kritik terhadap *taqlîd*, membuka pintu *ijtihad* dan *tajdîd*. Melalui jargon tersebut Muhammadiyah melancarkan aktivisme sosial (amal Usaha) dengan pendirian sekolah, rumah miskin (panti asuhan), modernisasi pendidikan, dan amal sosial lainnya yang merupakan agenda

---

<sup>2</sup>UMY *Mewujudkan*, h. 12.

<sup>3</sup> Pada tahun 1909 Dahlan bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo berbincang tentang persoalan nasib bangsa, dan pada saat itu Dahlan dijadikan sebagai pembimbing rohani Budi Utomo sekaligus diangkat sebagai anggotanya, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 86. Di sisi lain kontak Dahlan dengan jamiatul Khair terjadi pada tahun 1910, Dahlan belajar dari organisasi ini yang bergerak dibidang sosial keagamaan, berpikiran maju dan memiliki hubungan dengan pemimpin negara-negara Islam serta telah mendirikan sekolah dengan cara-cara modern, UMY, h. 12. Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-matahari Muhammadiyah* (Yogyakarta: Persatuan, 1980), h. 74.

<sup>4</sup>Organisasi ini lahir bersamaan dengan munculnya Pan Islamisme dari Jamaluddin al-Afghani. Tokoh muslim yang tercatat sebagai anggota tidak hanya KHA. Dahlan tetapi juga HOS. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim dua actor penting dalam organisasi Sarekat Islam, Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 140. Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, sebuah organisasi terbuka untuk setiap muslim tanpa diskriminasi asal usul, tetapi mayoritas anggotanya adalah orang-orang Arab. Ada dua kegiatan penting organisasi ini, pertama, pendirian dan pembinaan sekolah pada tingkat dasar, kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. Dahlan melihat organisasi ini sangat berperan pada saat itu karena memiliki jalur hubungan yang erat dengan Timur Tengah. Dahlan memasuki organisasi ini dan menjadi anggota dengan nomor induk keanggotaan 770. Pada saat organisasi ini mendatangkan guru-guru dari Mesir pada tahun 1911 setidaknya ada dua orang guru yang sangat giat menyuarakan gagasan Muhammad Abduh, dan menjalin hubungan baik dengan Dahlan, yaitu Muhammad Noer yang belajar di al-Azhar dari tahun 1899-1906 dan sempat menjadi murid Abduh, dan Syekh Ahmad Syurkati yang belakangan merintis berdirinya organisasi pembaharuan Islam al-Irsyad, Noer, h. 68. Hadikusumo, *Matahari*, h. 67. MT Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah dalam Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), h. 111.

pokok dari Muhammadiyah. Agenda-agenda tersebut satu kesatuan yang berkait kelindan tanpa terpisahkan dan menjadi karakter utama organisasi modernis ini. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan Muhammadiyah memiliki keterkaitan dengan gerakan-gerakan modernis Islam yang lahir pada awal abad ke -20. Idealisme perjuangan Muhammadiyah dapat ditemukan dalam gerakan-gerakan reformis lain meskipun dengan fokus perhatian dan penekanan yang berbeda satu sama lain. Kombinasi agenda-agenda tersebut menurut Arief Subhan menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan muslim modernis yang khas dan mendapat tempat tersendiri dalam konteks gerakan Islam di Indonesia. Terutama berkaitan dengan gagasan dan penyelenggaraan proyek pendidikan Islam modern.<sup>5</sup>

Menurut Azyumardi Azra gagasan tentang modernisasi pendidikan Islam berkait erat dengan munculnya gagasan-gagasan modern yang masuk ke dunia Islam termasuk di Indonesia. Sebab modernisasi pendidikan Islam sesungguhnya berawal dan berakar dari gagasan modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Untuk itu, modernisasi pemikiran dan institusi Islam merupakan prasyarat untuk kebangkitan umat Islam di masa modern. Karena itu Pendidikan Islam sebagai sebuah kelembagaan Islam

---

<sup>5</sup>Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam*, h. 146. Dalam konteks ini gerakan reformisme Islam Muhammadiyah memiliki titik temu dengan gerakan Wahabisme yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Yaitu gerakan yang lahir dari pemikiran Muhammad ibn Abd al-Wahhab di Arab Saudi pada abad 18 M. Gerakan Islam ini menjadi penting terutama ketika bekerja sama dengan kerajaan Arab Saudi menjadikan Wahabisme sebagai mazhab kerajaan. Gerakan ini dicirikan dengan identitas yang bersikap keras terhadap *bid'ah* dan *khurafat*, dan menolak ajaran mistisisme sebagai bentuk praktek keagamaan. Di sisi lain Wahhabisme juga menolak taqlid dan mendorong pintu ijtihad. Gerakan ini selanjutnya disponsori oleh tiga serangkai, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, meskipun dalam beberapa hal tidak sepenuhnya Wahhabisme akan tetapi persentuhan mereka dengan budaya Barat menjadikan gagasan mereka relatif berbeda dengan Wahhabisme. Namun dalam pandangan Harun Nasution, Muhammadiyah banyak dipengaruhi oleh pemikiran tradisional Rasyid Ridha. Ia menyatakan bahwa perbedaan metode berpikir yang terdapat antara M. Abduh dengan muridnya Rasyid Ridha tidak banyak diungkapkan sehingga timbul anggapan bahwa Rasyid Ridha adalah murid yang setia menganut paham-paham M. Abduh. Dari sini timbul pandangan yang menyatakan bahwa Muhammadiyah banyak dipengaruhi pemikiran rasional Abduh, Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), h. 153. Sementara Arbiyah Lubis, dalam disertasinya membuktikan bahwa sepanjang persoalan teologi, Muhammadiyah tidaklah mengikuti Abduh sama sekali. Setelah membandingkan kalam Abduh dan Muhammadiyah Arbiyah berkesimpulan tidak ada kesamaan antara keduanya. Teologi Abduh bersifat rasional dan karena itu dekat dengan kalam Mu'tazilah, sebaliknya kalam Muhammadiyah adalah teologi tradisional dan sebab itu lebih dekat dengan sistem teologi Asy'ariyah. Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 189. Sementara Azyumardi Azra melihat bahwa pandangan dunia Muhammadiyah merupakan semacam perpaduan antara "konsepsi kalam" (teologi) Muhammadiyah dengan perspektif "kemodernan". Bahkan perspektif modernitas inilah yang kelihatan menonjol dalam Muhammadiyah sehingga kemudian ia disebut sebagai organisasi modernis, meskipun dalam segi tertentu Muhammadiyah tidak sepenuhnya *compatible* dengan modernitas. Karena itu Azra menyebutnya dengan "teologi modernitas". Demikian pun Azra tidak sepenuhnya menerima atau menolak pandangan bahwa pemikiran Muhammadiyah dipengaruhi pemikiran Abduh karena ada beberapa kesamaan. Tetapi Azra juga mengakui bahwa Muhammadiyah tidak mengadopsi rasionalisme Abduh. Teologi modernitas Muhammadiyah tampak pada bidang "sosio-religius, Azyumardi Azra, "Dimensi Spritualitas Muhammadiyah", (makalah), (Jakarta:1997), h. 2.

harus diperbaharui sesuai dengan kerangka modernitas. Upaya mempertahankan kelembagaan tradisional akan memperpanjang ketidakberdayaan umat menghadapi modernitas bahkan akan menghambat pembangunan sumber daya umat yang kompetitif dan berdaya saing.<sup>6</sup> Lebih lanjut Azyumardi Azra menguraikan hubungan modernisasi dengan pendidikan khususnya dengan pendidikan Islam menyatakan bahwa meskipun pendidikan dipandang suatu variabel modernisasi akan tetapi hubungannya bersifat multi dimensional. Pendidikan pada satu sisi dipahami sebagai prasyarat dan kondisi yang serba mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dalam mencapai tujuan-tujuan modernisasi. Pengabaian terhadap pendidikan yang layak, akan sulit bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan. Karena itu pendidikan yang baik dan layak menjadi prasyarat dan kunci yang membuka pintu ke arah modernisasi.

Dalam kaitan itu para pembaharu Islam memandang pendidikan merupakan jalur strategis pengembangan manusia menurut kemauan agama Islam. Rasyid Ridha dari Mesir menyatakan bahwa salah satu maksud al-Alquran adalah untuk menyempurnakan jiwa manusia sebagai Individu, sebagai kelompok, dan sebagai bangsa melalui ajaran tentang fitrah manusia, pengembangan akal dan fikiran, ilmu, hikmat dan pemahaman, serta dalil-dalil dan bukti. Dengan demikian akan mendidik manusia bersikap tidak *taklid* dan *jumud* dalam mengikuti jejak leluhur, serta kebebasan individu dalam beragama. Sasaran Alquran yang demikian sesungguhnya manusia dididik keimanannya terhadap yang *ghaib* dan menerimanya sepenuh kepercayaan sejauh yang diajarkan Nabi. Namun diletakkan secara seimbang antara pendidikan agama dengan pendidikan yang bersifat kebendaan. Dengan pola pemikiran seperti itu menafsirkan agama itu adalah pendidikan.<sup>7</sup>

Tampaknya pandangan demikian yang diperoleh dari pemikiran Dahlan. Karena bagaimana pun pendidikan merupakan bidang paling strategis untuk mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. Dahlan sangat prihatin melihat kehidupan beragama Islam yang dilaksanakan masyarakat pada umumnya yang jauh dari tuntunan nilai-nilai *kitabullah* dan tuntunan Rasulullah. Di sisi lain kemiskinan dan kebodohan akibat dari penjajahan menambah beban rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penjajahan merupakan salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia hidup dalam kenestapaan. Dalam konteks pendidikan persoalan diskriminasi pendidikan pada satu sisi, dan pada sisi

---

<sup>6</sup>Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 31.

<sup>7</sup> MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah* (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Pendidikan, 1990), h. 60.

lainnya adalah adanya sikap proteksi dan ketertutupan sistem pendidikan Islam agar tidak terpengaruh terhadap pendidikan Barat yang dibawa oleh penjajah di antara warisan penjajahan yang membuat bangsa rakyat Indonesia tertinggal.

Sudut pandang ini yang menurut beberapa pengamat yang melatari pendirian organisasi ini yaitu berkaitan dengan gagasan pemikiran Dahlan tentang sistem pendidikan yang semestinya bagi umat Islam yaitu pendidikan yang sesuai dengan sumber ajarannya yang memajukan. Sejak awal bahkan sebelum mendirikan Muhammadiyah Dahlan sudah menaruh perhatian khusus mengenai arti penting pendidikan yang inovatif dan progresif bagi umat Islam tanpa kehilangan identitasnya. Yaitu memperbaharui sistem pendidikan Islam sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman.

Dahlan tidak puas terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan yang ada pada saat itu, yaitu disintegrasi sosial yang bermuara pada dikotomi dua kutub pendidikan, pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan pendidikan tradisional Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan *an sich* dan mendapat legitimasi dari masyarakat Islam. Sedangkan sekolah (Pendidikan Modern Belanda) mengajarkan ilmu-ilmu keduniaan dan mendapat legitimasi dari Pemerintah Kolonial. Dalam pandangan Dahlan keduanya sama-sama tidak menguntungkan karena disintegrasi ini akan melahirkan generasi yang *split personality* (kepribadian yang pecah). Pendidikan Islam yang berpusat di pesantren mengalami kemunduran karena terisolasi dari perkembangan masyarakat modern dan ilmu pengetahuan. Di pihak lain pendidikan Barat dipandang sekuler, tidak nasionalis dan historis mengancam kehidupan bathiniah pemuda pribumi.<sup>8</sup>

Kekhawatiran terhadap kondisi ini, Dahlan melahirkan *tajdid fi al-Islam* dalam lapangan pendidikan dengan merombak kurikulum pondok yang didominasi referensi kitab-kitab Syafi'iyah dan ajaran-ajaran al-Ghazali, diganti dengan kitab-kitab pembaharu. Majalah *al-Manâr*, *al-Urwah al-wuṣqa* dan *al-Munîr* juga mempengaruhi ide-ide pembaharuan pendidikan Dahlan. Meskipun ia memperoleh tanggapan keras dari Kanjeng Penghulu dan kaum tua yang menafsirkan Islam berdasarkan tradisi dan argumentasi kitab-kitab klasik.<sup>9</sup>

Dahlan menggagas pendidikan integratif, sebuah gagasan yang sangat mendasar pada zamannya. Hal ini dipandang sebagai keberhasilan Muhammadiyah dalam menjawab tantangan baru karena sikap dan kemampuannya beradaptasi, yakni kemampuan

---

<sup>8</sup>MT. Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 63.

<sup>9</sup> Arifin, Muhammadiyah Potret, h. 61.

menghadapi, mengatasi, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan baru. Baik tantangan yang muncul dari dinamika sosial internal maupun dari kontak sosial eksternal. Gagasan sebagaimana disebut merupakan dinamika yang ditemukan dalam konteks sosial pendidikan di organisasi ini. Sehingga pandangan ini mengilhami seluruh pendidikan yang diselenggarakannya. Pelaksanaan gagasan ini pertama sekali Muhammadiyah memperkenalkan sekolah-sekolah umum yang berbeda dengan sekolah-sekolah Gubernamen Belanda.<sup>10</sup> Pada tahun 1920 Muhammadiyah mendirikan sekolah Dasar 6 tahun yang setara dengan *Hollands Inlandsch School* (HIS). Pada tahun-tahun berikutnya Muhammadiyah terus melancarkan pendirian sekolah seperti *Hollands Inlandch Kweekschool* (HIK), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), dan *Algemene Middlebar School* (AMS). Sekolah-sekolah tersebut meskipun mengadopsi sistem Sekolah Umum pemerintah (Gubernamen) Belanda, namun Muhammadiyah tetap memasukkan mata pelajaran agama Islam sebagai muatan kurikulumnya.<sup>11</sup> Sekolah-sekolah ini terus berkembang ke luar Yogyakarta, yaitu Surabaya, Bausasran, Karangajen, dan di tempat lainnya.<sup>12</sup>

Konsep di atas menggambarkan bahwa priode awal lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah terinspirasi atau mengadopsi pendidikan sekuler Belanda dengan menambah mata pelajaran Islam ke dalam kurikulumnya. Model pendidikan ini merupakan hasil ijtihad penting pendidikan Muhammadiyah dilihat dari perspektif integrasi sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan Barat modern.

---

<sup>10</sup>Sebenarnya sebelum berangkat ke Mekkah tahun 1902, Dahlan telah memiliki sekolah keagamaan di Kauman Yogyakarta yang pengajarannya menggunakan Bahasa Arab dan muridnya berasal dari berbagai daerah. Sepulang dari ibadah haji antara tahun 1904-1905, Dahlan mendirikan pondok yang lebih tepat disebut dengan asrama atau pemondokan untuk menampung para pelajar. Namun semenjak tahun 1909 sekolah itu bubar karena Dahlan aktif di organisasi Budi Utomo dan sering meninggalkan tugas mengajar. Menurut keterangan Raden Sosrosogondo bubarnya sekolah ini disebabkan Dahlan memperkenalkan pemakaian meja dan kursi sehingga diboikot siswa, tetangga, dan famili serta warga Kauman. Maka sejak tanggal 1 Desember tahun 1911 sesuai dengan gagasannya Dahlan mendirikan sekolah rakyat (*Madrasah Ibtidaiyah*) dan *Madrasah Diniyah* merupakan sekolah rakyat formal pertama di Kauman. Proses pembelajaran dilaksanakan di ruang tamu rumah Dahlan yang sempit berukuran 2,5x6 M. Sekolah ini mengembangkan pendidikan Islam dengan standar pendidikan Barat dengan sistem pengajaran secara klasikal, suatu sistem pengajaran dan pengelolaan sekolah yang masih asing di kalangan masyarakat santri, bahkan tidak jarang mereka mengatakan sebagai sekolah kafir. Sekolah tersebut dikelola secara modern dengan mempergunakan metode dan kurikulum baru yaitu diajarkannya ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad 20. Murid pertama sekolah ini hanya 6 orang, setengah tahun kemudian penerimaan siswa meningkat 300% menjadi 20 orang. Menurut keterangan Van Niel sebagaimana dikutip Mt. Arifin sekolah tersebut merupakan dasar eksperimen pendidikan model baru yang sukses, dan sejak tahun 1915 sekolah Muhammadiyah itu mendapat subsidi dari pemerintah Belanda, Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 18-19. Arifin, *Muhammadiyah Potret*, h. 64. UMY, *Mewujudkan Cita*, h. 13.

<sup>11</sup>Dja'far Siddik, *Pendidikan Muhammadiyah Perspektif Ilmu Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 42.

<sup>12</sup>A. Munir Mulkhan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan*, h. 19.

Ijtihad pendidikan inilah yang pada gilirannya memicu lahirnya model lembaga pendidikan Islam modern yang diintrodusir Muhammadiyah yang dikenal dengan nama *HIS met de Qur'an* yang secara harfiah HIS dengan tambahan mata pelajaran Islam (Alquran) atau adopsi ilmu pengetahuan umum tambahan Alquran, istilah ini merupakan nama lain dari “sekolah umum plus”.<sup>13</sup> Dalam perkembangannya, sekolah model ini menjadi embrio munculnya “sekolah Islam (*Islamic School*) modern” di tanah air yang pada akhir abad ke-20 lembaga pendidikan model ini sangat populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia.<sup>14</sup>

Fakta ini membuktikan bahwa Muhammadiyah merupakan peletak dasar dan pelopor pembaharuan pendidikan Islam di Tanah Air. Lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakannya telah mendorong putra putri Indonesia untuk melanjutkan sekolah. Karena Muhammadiyah telah menawarkan pendidikan alternatif dengan mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang tidak dikhotomik antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Secara fundamental ini merupakan tajdîd dan ijtihad penting dalam konteks pendidikan di tanah air, bangsa Indonesia dididik menjadi bangsa yang utuh kepribadiannya tidak terbelah menjadi pribadi yang berilmu umum atau ilmu agama saja. Lulusan sekolah Muhammadiyah mampu memadukan iman dan kemajuan dalam kehidupannya, dan sanggup hidup di tengah-tengah peradaban modern. Perpaduan sistem ini memperoleh hasil yang berlipat ganda, Nakamura menguraikan beberapa keuntungannya sebagai berikut: *Pertama*, munculnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia melalui ajaran Islam. *Kedua*, melalui sekolah Muhammadiyah gagasan pembaharuan dapat disebarkan secara luas. *Ketiga*, penggunaan ilmu-ilmu praktis dari pengetahuan modern menjadi tersosialisasikan. Selain itu pendidikan Muhammadiyah juga menyediakan saluran alternatif bagi pendidikan anak pribumi yang ketika itu sekolah negeri tidak begitu terbuka termasuk untuk anak pedagang kaya.<sup>15</sup> Dampak yang cukup signifikan dari sekolah itu adalah lahirnya perubahan dan mobilitas sosial di masyarakat sebagai konsekuensi dari dorongan etos kerja, demokratisasi, dan rasionalitas penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung.

Sukses dan perkembangan sekolah-sekolah tersebut tidak terlepas dari sistem pendidikan yang dijalankan jauh dari pandangan-pandangan diskriminatif. Noeng

---

<sup>13</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan*, h. 37.

<sup>14</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan*, h. 79.

<sup>15</sup> Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arieses Over The Banyan Tree* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1993), h. 85-88.

Muhadjir dalam analisisnya menyebut bahwa sistem pendidikan Muhammadiyah adalah sistem yang berorientasi *populis humanistic* yaitu pendidikan yang berpihak kepada masyarakat pribumi tidak diskriminatif sebagaimana sekolah-sekolah Belanda. Menyelenggarakan pendidikan hanya untuk kalangan penguasa dan orang yang mampu. Pengajaran agama dan pengetahuan umum diarahkan ke pembentukan kepribadian humanistik. Menurutnya sistem ini perlu dipertahankan karena kepribadian muslim masa depan adalah pribadi human, aktif dalam upaya *amar ma'ruf nahi munkar*, produktif dan memiliki kesalehan sosial.<sup>16</sup> Hingga kini pendidikan tersebut masih eksis dan bertahan, secara kuantitatif apa yang dicapai oleh Muhammadiyah di bidang pendidikan sangat luar biasa, sumbangan Muhammadiyah bagi dunia pendidikan di tanah Air sangat signifikan.<sup>17</sup>

Sebagaimana dijelaskan bahwa secara historis pendidikan Muhammadiyah pada periode awal menggunakan sekolah umum sebagai basis pembaharuannya dengan menambahkan mata pelajaran keislaman. Hal ini sejalan dengan konsep Islam “berkemajuan”(tajdid) yang dicanangkan oleh Muhammadiyah termasuk pembelajaran Islam secara modern dalam sistem pendidikan Islam modern pula.<sup>18</sup> Di sisi lain konsep ini juga sejalan dengan kritikan kaum reformis termasuk di dalamnya Muhammadiyah terhadap lembaga pendidikan tradisional pesantren. Pada suatu kesempatan Dahlan pernah mengucapkan kekecewaannya terhadap pendidikan ini yang disampaikannya dalam pertemuannya dengan Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) pada tahun 1917 di Yogyakarta tentang kekolotan Islam di Jawa, paham Islam yang salah, lajunya upaya

---

<sup>16</sup>Noeng Muhadjir, *Tajdid Muhammadiyah di Bidang Pendidikan pada Era Globalisasi untuk Pemberdayaan Umat*, MT-PPI PP Muhammadiyah, *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban* (Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah/UAD Press, 2005), h. 135.

<sup>17</sup>Pada tahun 1926 di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Jakarta, Muhammadiyah telah memiliki 126 sekolah, seiring dengan perkembangan organisasi, perkembangan pendidikan juga mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 1957 Muhammadiyah telah memiliki 682 Madrasah dan pada tahun 2004 bertambah menjadi 789, sedangkan sekolah pada tahun 1957 sebanyak 877 dan pada tahun 2004 sebanyak 6.684. Berita Resmi Muhammadiyah melaporkan bahwa sampai tahun 2015, dalam bidang pendidikan organisasi ini telah memiliki Taman Kanak-kanak (Bustanul Athfal) sebanyak 2.289 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI/MD) sebanyak 1428, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.176, sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.188, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 634, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 515, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 276, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 172, Pondok Pesantren sebanyak 67, Perguruan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi) sebanyak 151, Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 71, dan Perguruan Tinggi yang dikelola Aisyiyah sebanyak 11 buah. Sedangkan Balai kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, DII sebanyak 457, Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga sebanyak 318, Panti Jompo sebanyak 54 dan Rehabilitasi Cacat sebanyak 82 buah, PP Muhammadiyah, *Profil Abad Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010, Cet. ke-3), h. xii.

<sup>18</sup>Istilah “berkemajuan” dalam tulisan ini merujuk kepada ucapan dari KH. Ahmad Dahlan yang sering diucapkan didepan siswanya, secara semantik yang dimaksud adalah “memajukan”. Kata ini menjadi sebuah istilah yang populer dan baku di kalangan Muhammadiyah, bahkan kata ini menjadi tema penting yang diusung dalam berbagai forum resmi Muhammadiyah, sehingga kata ini menjadi ciri sekaligus watak yang melekat pada organisasi ini.



kristenisasi serta keinginan untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam dengan model baru.<sup>19</sup> Kritikan inilah yang antara lain melatarbelakangi lahirnya eksperimen sistem pendidikan Islam modern.

Dengan demikian gagasan pembaharuan pendidikan Islam tidak berhenti pada integrasi dua jenis pendidikan itu. Sekolah-sekolah madrasah berasrama (*boarding school*) dalam bentuk pesantren juga menjadi perhatian penting Dahlan waktu itu. Meskipun Dahlan sering mengkritik pendidikan pesantren akan tetapi dalam pandangannya pesantren tetap memiliki sisi positif dalam memberikan penguatan keislaman, khususnya keulamaan yang dalam bagi peserta didik. Kelemahan pesantren waktu itu adalah lemahnya wawasan yang berkemajuan serta model pembelajarannya yang jauh tertinggal dengan perkembangan zaman. Karena itu, Dahlan bermaksud mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan model pesantren yang mampu menguatkan keislaman yang dalam di satu pihak, dan memberikan wawasan kemodernan dan *berkemajuan* pada pihak lain.<sup>20</sup>

Sukriyanto AR menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berarti gerakan agama. Maka tanpa penguasaan agama makna Muhammadiyah sebagai gerakan Islam akan kehilangan ruh, elan vital dan makna gerakan Islam akan kabur. Tanpa adanya ruh Islam semangat dakwah amar makruf nahi mungkar dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman (*tafaqquh fi al-din*) gerakan Muhammadiyah akan berubah menjadi gerakan sosial semata atau menjadi sesuatu yang lain.<sup>21</sup> Dalam konteks ini lah lembaga pendidikan pesantren memiliki posisi yang sangat strategis bagi ormas ini karena sangat terkait dengan sifat Muhammadiyah.

Pandangan di atas menjadi landasan bagi organisasi ini untuk mendirikan pesantren yang secara implisit bertujuan untuk melahirkan calon-calon ulama yang akan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Pesantren yang akan didirikan adalah pesantren yang bercita rasa Muhammadiyah yang secara khusus diorientasikan untuk pembentukan dan pembibitan kader ulama, dai', dan muballigh yang intelek dan intelek yang ulama sebagaimana pertama kali Dahlan merumuskan tujuan pendidikan Islam organisasi ini. Untuk itu keberadaan pesantren merupakan syarat mutlak bagi Muhammadiyah untuk

---

<sup>19</sup>Arifn, *Muhammadiyah Potret*, h. 63.

<sup>20</sup>Imran Rosyadi, "Argumentasi Perlunya Dibentuk Majelis Pesantren", *ITMAMWarta Ma'had Muhammadiyah* (Yogyakarta: Ed. 1, 1436 H), h. 14.

<sup>21</sup>Sukriyanto AR, Pembinaan Kader Muhammadiyah, dalam, *Berita Resmi Muhammadiyah (BRM)*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, No. 21, 1990-1995), h. 72.

mencetak ulama yang berfungsi sebagai penggerak, pengawal dan penopang seluruh aktivitas Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-citanya.

Sesungguhnya pendirian pesantren di organisasi ini didorong oleh problematika pendidikan Muhammadiyah. Praktik Pendidikan Muhammadiyah tidak selalu berjalan secara ideal, pendidikan Muhammadiyah mengalami berbagai persoalan, salah satunya adalah hilangnya nilai solidaritas sosial dari penyelenggaraan pendidikannya, karena ternyata pendidikan Muhammadiyah telah melahirkan pola individualisme. Konsekuensinya menurut Kuntowijoyo lebih lanjut pendidikan Muhammadiyah tidak memiliki basis budaya yang jelas. Penekanan terhadap pemurnian ajaran dapat mengakibatkan kecenderungan gaya hidup praktis yang mengabaikan simbol-simbol. Dalam hal ini nilai dan bentuk simbol dalam sistem pendidikan Muhammadiyah mengalami erosi yang sangat deras. Kecakapan-kecakapan berorganisasi dapat menjurus kepada hubungan-hubungan formal, sehingga menurutnya pendidikan Muhammadiyah ibarat tumbuhan yang berbuah tetapi tanpa rasa.<sup>22</sup> Hal yang sama adalah kritikan yang juga dikemukakan kalangan warga Muhammadiyah tentang pengembangan pendidikan yang bersifat *government oriented* dan lebih banyak karena tuntutan pragmatis yang membuat lemah ciri dan identitas keislaman dalam tubuh pendidikan Muhammadiyah.<sup>23</sup> Sehingga memunculkan pertanyaan yang mengemuka seputar, apakah perbedaan sekolah Muhammadiyah dengan non- Muhammadiyah.<sup>24</sup>

Di sisi lain menurut Kuntowijoyo pertumbuhan pesantren di internal organisasi ini dipicu oleh problema yang dihadapi pendidikan Muhammadiyah yang sudah berbeda dengan masa lampau. Karena pembaharuannya sudah mencapai *form-maximum*-nya sehingga menurutnya perlu pembenahan pada aspek teologis agar beban kultural etos kerja masa lalu dapat digantikan dengan etos baru, yakni pendidikan Muhammadiyah yang mampu merajut solidaritas sosial dan mengembangkan sistem kebudayaan sosial dalam pendidikan melalui sistem pondok.<sup>25</sup>

Posisi pondok pesantren di lingkungan organisasi ini semakin penting sebagai model lembaga pendidikan yang akan dikembangkan. Penguatan perhatian terhadap lembaga ini terjadi pada era tahun 1975-2000. Era ini dipandang sebagai tahap penguraian

---

<sup>22</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), h. 270.

<sup>23</sup> Abdul Mu'ti, Mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah di Tengah Modernisasi Madrasah dan Spritualisasi Sekolah, Muhammad Ali, (Kata Pengantar) *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah* (Jakarta: al-Wasat, 2010), h. xxv.

<sup>24</sup> Abdul Mu'ti, Mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah di Tengah Modernisasi Madrasah dan Spritualisasi Sekolah, Muhammad Ali, (Kata Pengantar) *Reinvensi*, h. xxv.

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, h. 271.

problematika pendidikan dan pencarian model-model pendidikan alternatif yang sebangun dengan perkembangan zaman. Salah satu model pendidikan yang ingin dikembangkan adalah sistem pendidikan pondok pesantren.<sup>26</sup> Ekspektasi warga Muhammadiyah yang disampaikan lewat forum-forum resmi terhadap lembaga ini sangat besar, minat masyarakat untuk menitipkan putra putri mereka di pesantren-pesantren ini juga mengalami peningkatan.

Sebagai model lembaga pendidikan alternatif yang akan dikembangkan di lingkungan organisasi ini, pesantren tumbuh dengan cukup mengesankan, hasil survey menyebutkan bahwa sejak organisasi ini berdiri telah memiliki sebanyak 67 buah pesantren yang terdaftar secara formal di PP Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.<sup>27</sup> Sementara itu data yang diperoleh dari *Ittihadu al-Ma'ahid al-Muhammadiyah* (ITMAM) yaitu Ikatan Pondok Pesantren Muhammadiyah) melaporkan jumlahnya jauh lebih banyak, yang berarti lebih separoh jumlah itu tidak terdaftar di PP Muhammadiyah yang mencapai kurang lebih 150-an buah.<sup>28</sup> Namun data terakhir yang dilaporkan ketua Panitia Rapat Koordinasi Nasional Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia (Dr. H. Maskuri, M. Ed) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren (LP2) PP Muhammadiyah pada tanggal 28-30 Oktober 2016 di Makassar bahwa jumlah pesantren Muhammadiyah sebanyak 180 buah yang terdaftar secara resmi di PP Muhammadiyah. Dengan latar belakang pendiri yang berbeda-beda pula, ada yang didirikan oleh PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, bahkan ada yang didirikan oleh para simpatisan, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan para alumni Pondok Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM).<sup>29</sup> Bahkan muncul pesantren perguruan tinggi di universitas Muhammadiyah.

---

<sup>26</sup>MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret*, h. 355.

<sup>27</sup> Pada tahun 2000 Pondok Pesantren Muhammadiyah berjumlah sebanyak 55 dan pada tahun 2005 berjumlah 57 buah. Namun data resmi yang dikeluarkan PP Muhammadiyah tahun 2010 berjumlah sebanyak 67 buah pesantren, PP Muhammadiyah, *Profil 1 Abad Muhammadiyah*, h. xii.

<sup>28</sup>Imran Rosyadi pengasuh Pondok Pesantren Hajjah Nuriyah Shabran dalam tulisannya yang berjudul "Argumen Perlunya dibentuk Majelis Pesantren" menyebut kurang lebih 150 jumlah pesantren Muhammadiyah di bawah Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Warta Ma'had Muhammadiyah*(majallah), edisi Khusus Muktamar. 001, 1436 H, h. 14. Data ini dibenarkan oleh Ustad Yunus Muhammadi ketika dikonfirmasi, beliau menginformasikan bahwa pada Silatnas ke-II di Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo bahwa per tahun 2015 jumlah pesantren Muhammadiyah sebanyak 150-an, Yunus Muhammadi, Ketua ITMAM, *wawancara*, via telpon pada Ahad 04 Desember 2016, Pukul 05. 30.

<sup>29</sup>Laporan Ketua Panitia Rakornas Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia pada tanggal 28-30 Oktober 2016 di Makassar.

Angka tersebut walaupun tidak berbanding dengan jumlah sekolah-sekolahnya terlebih jika dibandingkan dengan jumlah pesantren yang dikelola oleh kalangan NU dan perseorangan dengan berbagai ragam dan variannya. Akan tetapi data ini menunjukkan perhatian dan harapan Muhammadiyah terhadap pendidikan pesantren sangat besar.

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang lahir dari rahim Muhammadiyah pertumbuhan dan perkembangan beberapa pesantren ini memperlihatkan keragaman dan corak yang disematkan kepadanya. Di Jawa Timur tepatnya di Jombang muncul pesantren *Trendsains*, sementara itu di Jawa Tengah dan di Yogyakarta muncul pesantren dengan nama *Madrasah Boarding School* atau *Islamic Boarding School*, kemudian ada pesantren Muhammadiyah yang berpola pesantren klasik (*salafi*) bahkan muncul pola pesantren perguruan tinggi. Meskipun ditemukan keragaman, tetapi pesantren-pesantren ini merupakan amal usaha yang tidak terpisahkan dari Muhammadiyah yang digerakkan dalam satu paket (*built in*) dalam keseluruhan sistem organisasi. Sebagaimana tertuang dalam hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang yang memutuskan bahwa sekolah Kader/Pesantren adalah bagian integral dari keseluruhan sistem kaderisasi dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah dan berfungsi sebagai mitra kerja Majelis Pendidikan Kader dalam melakukan proses kaderisasi baik secara formal maupun informal dengan tetap berpegang pada asas pendidikan Muhammadiyah.<sup>30</sup> Pesantren-pesantren tersebut, merupakan pesantren yang dikelola langsung oleh pimpinan Muhammadiyah dengan tujuan ideal mencetak calon kader ulama Muhammadiyah.

Kenyataan ini dipandang sebagai fenomena menarik yang menunjukkan terjadinya evolusi pendidikan pesantren tidak saja dalam bentuk sekolah dan madrasah. Akan tetapi juga berevolusi dalam bentuk varian pesantren universitas yaitu sintesa atau konvergensi antara pesantren dengan Perguruan Tinggi. Kenyataan ini juga menunjukkan adanya dinamika yang kuat dalam eksperimentasi pendidikan pesantren di lingkungan organisasi ini yang justru berbeda dengan tesis perkembangan pesantren pada umumnya sebagaimana ditemukan para peneliti. Perkembangan dan elaborasi ini diprediksi akan terus bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas yang mencerminkan bahwa pergulatan eksperimen pendidikan Islam termasuk pondok pesantren dalam konteks modernitas masih terus berlangsung di lingkungan organisasi ini. Pertumbuhan ini dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan ulama dan mengindikasikan adanya gerakan yang bersifat massif untuk menanggulangi krisis ulama.

---

<sup>30</sup> PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971*

Capaian kuantitas sebagaimana gambaran tersebut, walaupun terlihat cukup pesat akan tetapi tidak memadai untuk dijadikan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pendidikan pesantren di lingkungan Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan yang diproyeksikan untuk mencetak bibit ulama. Fakta dilapangan menunjukkan betapa Muhammadiyah sangat kekurangan ulama, muballigh, da'i dan ustad yang akan menopang aktivitas keagamaan khususnya di akar rumput. Pada saat yang sama di beberapa daerah pesantren-pesantren ini juga sangat membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tidak sedikit yang mengalami "kembang kempis" mencari siswa. Mengindikasikan pengelolaan pesantren ini kurang mendapat perhatian secara optimal. Tentu saja tanpa mengabaikan pesantren lainnya yang sudah favorit karena proses masuknya harus melalui seleksi yang ketat. Kondisi ini berkait kelindan dengan proyek penyiapan calon kader ulama melalui jalur pesantren. Padahal corak pembaharuan pendidikan Islam Muhammadiyah menurut Amin Abdullah adalah corak progresif yaitu sifatnya yang selalu berorientasi ke depan (*future oriented*), yaitu semangat untuk memperbaiki, mengoreksi, dan menyempurnakan cara berpikir dan mekanisme kerja yang sekarang ini sedang berjalan selalu diprioritaskan. Corak dan metodologi pembaharuannya selalu tanggap terhadap perubahan sosial dan tuntutan zaman yang selalu berubah.<sup>31</sup> Apakah kondisi dan kecenderungan ini mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan riil di internal organisasi ini? Kritikan masyarakat dan warga Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah dan pesantrennya selalu mendapat "subsidi" dari pesantren NU dalam bentuk bergabungnya tenaga ulama atau kyai dari pesantren yang kemudian menjadi anggota inti. Muhammadiyah selama ini baru mendapat limpahan kyai/ulama produk pesantren-pesantren yang bukan Muhammadiyah, di samping dari Perguruan Tinggi Islam dan alumni Timur Tengah. Hal ini merupakan problema yang tidak kecil bagi masa depan Muhammadiyah karena sangat terkait dengan wibawah dan otoritas.

Dalam lingkup Sumatera Utara persoalan kelangkaan ulama, muballigh, dan dai ini sering mengemuka di dalam forum-forum resmi yang digelar oleh pimpinan Muhammadiyah. Padahal dibanding dengan daerah lain sesungguhnya Muhammadiyah Sumatera Utara tergolong sebagai perintis penyelenggara pendidikan pesantren

---

<sup>31</sup> Amin Abdullah, dalam, Said Tuhuleley, *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2003), h. 43.

Muhammadiyah di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1950-an Muhammadiyah Sumatera Utara telah mendirikan dua lembaga pendidikan calon kader ulama yaitu *Muallimin* Tamiang di Mandailing dan *Kulliyatul Muballighin* di Barus. Dua lembaga ini merupakan sekolah kader ulama Muhammadiyah di Tapanuli. Meskipun tidak menggunakan istilah pesantren tetapi secara substansial tujuannya sama dengan pesantren akan tetapi dua sekolah ini tidak berumur panjang. Selanjutnya pada tahun 1962 Muhammadiyah Sumatera Utara mendirikan Pondok Pesantren KHA. Dahlan di Sipirok. Dalam skala nasional pesantren ini cukup dikenal terutama di internal Muhammadiyah sebagai pesantren rintisan. Kemudian pada tahun 1983 Muhammadiyah Sumatera Utara juga mendirikan Pesantren Darul Arqam di Kerasaan Kabupaten Simalungun. Namun pesantren ini juga tidak berumur panjang sehingga beralih status menjadi sekolah regular. Selanjutnya pada tahun 1988 Muhammadiyah Sumatera Utara mendirikan Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu Binjai yang terletak di Kabupaten Langkat. Karena itu, sampai sekarang Muhammadiyah Sumatera Utara hanya memiliki dua pesantren yang eksis dengan nama pesantren, yaitu Pesantren KHA. Dahlan Sipirok dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu. Secara administratif dua pesantren ini diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara yang dimandatkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat sebagai pelaksana pendidikan. Sebagai pesantren Muhammadiyah, dua pesantren ini dirancang oleh tokoh-tokoh pendirinya sebagai lembaga pendidikan perkaderan calon ulama khususnya di tempat masing-masing.

Satu hal yang patut diakui bahwa dua pesantren ini pasti digerakkan oleh sistem pendidikan yang saling berkait untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu penyiapan calon kader ulama. Namun segera dipertanyakan bagaimana proporsi penyiapan calon kader ulama terakomodir di dalam sistem pendidikan di dua pesantren ini? Apakah kemungkinan dua pesantren tersebut telah menerapkan standar penyelenggaraan pada masing-masing sistem? Secara akademik permasalahan ini patut diajukan mengingat fakta dilapangan yang menunjukkan jumlah ulama, dai, dan muballigh Muhammadiyah semakin kecil, yang tidak berbanding lurus dengan usia dua pesantren ini yang telah banyak melahirkan lulusan. Dalam konteks inilah sesungguhnya penelitian ini menjadi penting untuk melihat persinggungan dan keterhubungan tujuan pesantren dengan sistem pendidikan yang dijalankan.

Pada sisi lainnya bahwa secara umum idealisasi penyelenggaraan pesantren di lingkungan ormas ini merupakan perpaduan dari sistem madrasah atau sekolah, sistem

kepesantrenan modern, dan plus kekaderan ulama. Tiga sistem ini menyatu padu dalam penyelenggaraan Pesantren Muhammadiyah sehingga muatan isi pembelajaran merupakan refleksi dan pemenuhan ketiga sistem dimaksud. Dalam konteks inilah sesungguhnya pesantren Muhammadiyah dapat dilihat memiliki tiga orientasi yang diandaikan mampu memprasaranaikan peserta didik menjadi calon kader ulama. Dalam ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah tentang penyelenggaraan pondok pesantren secara implisit menyebutkan tiga orientasi ini yang ditunjukkan dengan pembelajaran *ayat kauniyah*, *ayat qauliyah*, dan perkaderan ulama plus pembinaan pada aspek akidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah duniawiyah.<sup>32</sup> Prasaran yang disampaikan pada Lokakarya tentang sekolah kader Muhammadiyah tahun 2007 di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang telah merekomendasikan tiga orientasi sekolah kader Muhammadiyah. Meskipun dengan redaksi yang berbeda akan tetapi secara substansial tujuannya sama yaitu orientasi keislaman, orientasi keilmuan dan orientasi kejuangan.<sup>33</sup> Dalam praktek proses pembelajaran pada dua pesantren ini juga menampakkan tiga kecenderungan orientasi pendidikan sebagaimana disebutkan.<sup>34</sup> Ketiga kecenderungan itu terlihat pada program pendidikan atau muatan kurikulum yang diselenggarakan. Pertama bahwa kedua Pesantren ini mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan plus pembinaan pada aspek akidah, ibadah, dan akhlak), sebagai upaya pembentukan spritualitas santri untuk memiliki pribadi yang ihsan, saleh, taat, dan menjadi teladan. Orientasi ini bertujuan untuk pengembangan sikap kepribadian keulamaan santri. Kecenderungan kedua adalah selain pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan dua pesantren ini juga mengajarkan ilmu-ilmu sosial humaniora dan ilmu-ilmu kealaman secara utuh. Kecenderungan orientasi kedua ini sebagai upaya peningkatan kultur akademik, ilmu pengetahuan, dan wawasan global peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran ilmu-ilmu diorientasikan untuk pengembangan modernitas santri. Kecenderungan orientasi ketiga adalah pembelajaran pendidikan jasmani, keterampilan, dan kemasyarakatan (*mu'amalah duniawiyah*). Kecenderungan terakhir ini merupakan upaya untuk menumbuhkan praksis sosial, *social skill* atau peran-peran kemasyarakatan para santri dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

---

<sup>32</sup>Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, *Ketentuan Penyelenggaraan Pondok Pesantren* (Jakarta Pusat: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2013), h. 76 dan 83.

<sup>33</sup>Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Prasaran pada Lokakarya Sekolah Kader* (Malang: MPK PP Muhammadiyah, 2007), h. 3.

<sup>34</sup>Observasi awal dilakukan ke Pesantren Kuala Madu Langkat dan ke Pesantren KH. Ahmad Dahlan Sipirok pada bulan Desember 2016 dan pada bulan november 2016.

Ketiga orientasi ini merupakan satu kesatuan yang integral dalam proses pembelajaran untuk melahirkan ulama yang memiliki wawasan keislaman yang dalam pada satu sisi dan pada sisi lainnya memiliki wawasan global yang memiliki kepekaan sosial dan keumatan. Ketiga orientasi tersebut merupakan tujuan pokok institusional yang tidak dapat dipisahkan yang diharapkan akan melahirkan bibit ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Secara historis dua pesantren ini merupakan implementasi dari cita-cita ideal tokoh pendiri tentang kader umat Islam yang menguasai ilmu umum dan ilmu agama secara terpadu dalam diri lulusannya serta memiliki rasa keberpihakan terhadap masalah umat.<sup>35</sup>

Melihat gambaran tersebut di atas menggugah pikiran dan keingintahuan untuk melakukan pengkajian terhadap dua pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Sebagai bagian yang integral dalam sistem kepesantrenan Muhammadiyah dua pesantren ini mengemban misi sebagaimana hasil Mukhtamar Muhammadiyah tentang urgensi pesantren yaitu lembaga “pendidikan kader” untuk mengatasi kelangkaan ulama/da’i sehingga dipandang perlu agar setiap Wilayah dan Daerah mendirikan pesantren.<sup>36</sup> Karena itu, pengkajian terhadap sistem dan orientasi pendidikan dipandang mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan dua pesantren ini terlebih dalam mewujudkan misinya.

Berdasarkan pandangan tersebut dan mengingat masih minimnya kajian tentang ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang sistem dan orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Sebelum identifikasi dan pembatasan masalah, perlu diuraikan batasan istilah sebagaimana dalam judul penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasi sehingga penting untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>Di dalam Rekapitulasi Data Amal Usaha Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara pesantren masih tertulis tiga buah, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Kerasaan belum dihapus dari data PWM sebagai pesantren. PWM SU, Rekapitulasi Data Amal Usaha Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada Selasa, 25 April 2017.

<sup>36</sup> PP. Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 42 tanggal 15-19 Desember 1990 di Yogyakarta* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1991), h. 10. Tanfidz Keputusan Mukhtamar tersebut diperkuat oleh Tanfidz Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Jakarta 1992 tentang pesantren sebagai sekolah kader, salah satu jenis sekolah di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria khusus dan diprogram secara formal sebagai tempat pendidikan kader ulama baik pelajar maupun mahasiswa, PP Muhammadiyah, *Tanfidz tentang Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Jakarta tahun 1992* (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 1992), h. 5.



## 1. Pengertian sistem

Sistem yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sistem pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu penyiapan calon kader ulama pada dua pondok pesantren Muhammadiyah di Sumatera utara yang meliputi, tujuan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, sarana prasarana, dan manajemen. Pesantren Muhammadiyah merupakan perpaduan dari sistem madrasah, sistem kepesantrenan modern plus kekaderan ulama. Karena itu, perpaduan sistem sebagaimana disebut juga masuk dalam lingkup pemaknaan sistem dalam kajian ini.

## 2. Pengertian Orientasi

Orientasi dalam kajian ini dimaknai sebagai program pembelajaran yang menunjukkan model pendidikan yang berorientasi kepada penyiapan kader ulama intelek dan intelek ulama. Program pendidikan dimaksudkan adalah keseluruhan aktivitas yang memuat kebulatan pengalaman belajar dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan dua pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Aktivitas dimaksudkan meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, *hidden* kurikulum, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler yaitu kegiatan pendidikan yang disampaikan dalam bentuk tatap muka, *workshop* (pelatihan, perkaderan dan tugas-tugas lapangan). Sedangkan program kokurikuler adalah kegiatan pendukung intrakurikuler yang dilaksanakan di luar tatap muka seperti latihan membaca dan mengkaji kitab kuning (*qirâ'ah al-kutub*) dan *tahfîz wa tahsîn al-qirâ'ah*, dan latihan *tablîg (muḥadârah)*. Selanjutnya adalah *hidden kurikulum* yaitu program pendidikan yang terkait dengan pengalaman belajar yang diperoleh dari interaksi dengan civitas pondok, para ustad dan pengelola. Kegiatan ini dapat berbentuk pemberian keteladanan, pengawasan, pengarahan, bimbingan (konseling), dan pengendalian langsung. Sedangkan yang terakhir adalah program ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang dapat menumbuhkan minat dan bakat, keorganisasian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Orientasi dalam kajian ini meliputi tiga aspek yaitu, aspek orientasi keulamaan (keislaman), aspek orientasi kemodernan, dan aspek orientasi praksis sosial. Orientasi keulamaan dimaksudkan adalah kegiatan pendidikan yang diarahkan pada pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan, pembinaan akidah, ibadah, akhlak, dan *mu'amalah dunyawiyah*. Orientasi ini merupakan aspek yang akan mengembangkan keilmuan teoretis dan menguatkan komitmen keislaman, spritualitas, dan perilaku santri sebagai calon kader ulama. Sedangkan orientasi kemodernan adalah kegiatan pendidikan yang terkait dengan

pengembangan kultur akademik, ilmu pengetahuan dan wawasan. Orientasi kemodernan ini diperoleh melalui proses pembelajaran ilmu-ilmu umum yang disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek, diskusi, mudzakah, dan pelatihan keorganisasian. Sedangkan orientasi praksis sosial adalah pembinaan peran-peran kemasyarakatan baik di internal maupun eksternal pesantren.

### 3. Pengertian Pendidikan

Secara teoritik banyak ragam pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh para ahli disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda. Secara operasional Undang-undang Sitem pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 pendidikan didefinisikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.<sup>37</sup> Secara operasional Muhammadiyah sendiri memiliki definisi pendidikan yaitu “semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota Muhammadiyah, baik di dalam atau di luar hubungan organisasi, terhadap anak-anak sendiri, anak-anak sesama anggota Muhammadiyah, ataupun anak-anak bukan anggota Muhammadiyah yang bertujuan membimbing perkembangan anak-anak dimaksud menjadi manusia muslim yang bercita-cita menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.<sup>38</sup> Sesuai dengan definisi tujuan pendidikan tersebut, pendidikan Muhammadiyah terutama dalam pelaksanaan/penyelenggaraannya harus lebih menyeimbangkan antara pembinaan/pengembangan aspek intelektual dan kecakapan dengan pembinaan/pengembangan akhlak dan rohaniyah, atau keseimbangan antara pembinaan/pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam misi pendidikan Muhammadiyah. Hal demikian sejalan dengan Pendidikan Nasional dan tujuan pembangunan Nasional.<sup>39</sup>

Secara konseptual dan operasional definisi di atas masih sangat luas dalam kajian ini sehingga pengertian pendidikan perlu dibatasi. Batasan pendidikan yang dimaksudkan adalah sebagai usaha sadar dan terencana melalui pengajaran, bimbingan, dan keterampilan yang memadukan proses formal, non-formal, dan informal (interaksi di internal pesantren), keterpaduan antara teori dan praktek yang disalurkan melalui kegiatan intrakurikuler,

---

<sup>37</sup>Undang-undang sistem Pendidikan Nasional nomor: 2 Tahun 2003.

<sup>38</sup>PP Muhammadiyah, *Tuntunan Organisasi Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1971), h. 26.

<sup>39</sup>PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1990), h. 26.

kokurikuler, ekstrakurikuler dan *hidden* kurikulum yang berlangsung di pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

#### 4. Pengertian Pesantren

Sedangkan istilah pesantren dalam kajian ini tentulah pesantren Muhammadiyah yaitu “lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus serta diprogram secara formal sebagai tempat penyemaian kader ulama dan calon da’i yang menguasai ilmu yang bersumber pada *ayat qauliyah* dan *ayat kauniyah*”. Penekanan istilah pesantren dalam studi ini difokuskan pada pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara yang berjumlah sebanyak dua buah yaitu Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan di Sipirok Kab. Tapanuli Selatan dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu di Kabupaten Langkat.

Dengan demikian, judul Sistem dan orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara dimaksud adalah kegiatan sistemik dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren yang secara sadar diorientasikan sebagai lembaga pembibitan calon kader ulama.

Sejak awal bahkan sebelum berdiri, organisasi ini telah menunjukkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Pendidikan bagi organisasi ini menempati posisi sangat strategis, karena dipandang sebagai media yang efektif dalam mewariskan dan menginternalisasikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagaimana dipahami Muhammadiyah dari generasi ke generasi. Satu hal yang patut dipastikan menurut Dja’far Siddik adalah di mana pun tumbuh dan berdiri organisasi Muhammadiyah di sana akan ditemukan aktitas pendidikan Muhammadiyah.<sup>40</sup>

Ijtihad pendidikan Muhammadiyah adalah mencoba menemukan model pendidikan Islam dengan paradigma baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam pada masa itu. Karena itu, menurut Arbiyah Lubis *tajdid* Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada saat itu.<sup>41</sup>

Pada satu sisi pendidikan *gubernamen* yaitu sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Kolonial Belanda yang disebut pendidikan modern dalam aspek-aspek tertentu memiliki keunggulan karena didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai sehingga proses pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Akan tetapi muatan isi pembelajaran model sekolah ini tidak bersentuhan dengan iman dan kesalehan, sehingga sekolah ini pada waktu itu tidak

---

<sup>40</sup>Dja’far Siddik, *Pendidikan Muhammadiyah Perspektif Ilmu Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 36.

<sup>41</sup>Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 102.

termanfaatkan anak-anak muslim karena dipandang sekuler. Di sisi lainnya ada sekolah Islam yang disebut dengan pondok pesantren yaitu lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat Islam.<sup>42</sup> Meskipun Dahlan sering mengkritik pesantren akan tetapi dalam pandangannya pesantren tetap memiliki sisi positif dalam penguatan keislaman. Kritikan Dahlan terhadap pesantren terkait dengan kandungan kurikulum, teknik dan metode pembelajarannya.

Atas dasar itu Dahlan tidak cenderung kepada salah satunya akan tetapi menggabungkan dua aspek positif yang terdapat pada kedua model pendidikan itu dengan mengeliminasi sisi-sisi kelemahannya. Beranjak dari pandangan tersebut bahwa pada satu sisi Ahmad Dahlan ingin melakukan modernisasi terhadap pendidikan tradisional pondok pesantren melalui perbaikan metodologi pembelajaran sekaligus memasukkan ilmu-ilmu non keagamaan ke dalam kurikulum sehingga melahirkan Madrasah Muhammadiyah. Pada sisi lain Dahlan melakukan islamisasi muatan kurikulum terhadap sekolah-sekolah Belanda yang akhirnya melahirkan Sekolah Muhammadiyah. Namun dalam konteks historis sosiologis perkembangan dua model pendidikan ini tidak selalu berjalan sama. Dalam praktiknya Sekolah Muhammadiyah jauh lebih berkembang dibanding dengan Madrasah Muhammadiyah. Apakah kenyataan ini berkait erat dengan *tajdid* pendidikan sebagaimana pandangan Azyumardi Azra, bahwa basis pembaharuan pendidikan Muhammadiyah berawal dari pengadopsian dari pendidikan Belanda secara konsisten dan menyeluruh bukan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti surau dan pesantren.<sup>43</sup> Sehingga berimplikasi terhadap rendahnya pendirian madrasah di lingkungan organisasi ini. Bahkan sebagai akibatnya banyak kalangan yang menyatakan bahwa Muhammadiyah menjaga jarak dari pesantren atau berada di luar pesantren. Barangkali inilah yang pernah disinyalir oleh Yunahar Ilyas dalam sebuah pengajian di TV Muh yang menyatakan “bagaimana pun Muhammadiyah berupaya mendirikan pesantren akhirnya yang berdiri adalah sekolah, sebaliknya bagaimana pun NU berupaya mendirikan sekolah akhirnya yang berdiri dan berkembang adalah pesantren. Pernyataan ini dapat diterima karena secara cultural pesantren *genre*-nya NU sedangkan sekolah *genre*-nya Muhammadiyah.

Jika pandangan di atas dijadikan titik tolak, sesungguhnya ketika Muhammadiyah kian tertarik menggarap dan mendirikan pesantren di berbagai daerah, lantas pertanyaan yang diajukan adalah pesantren yang bagaimana yang akan didirikan? Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi penting untuk mengurai sistem dan orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah

---

<sup>42</sup>Dja'far Siddik, *Pendidikan Muhammadiyah*, h. 37.

<sup>43</sup>Azymardi Azra, *Pendidikan Islam*, h. 37.

di Sumatera Utara. Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan pesantren dibawah naungan organisasi ini menarik untuk diteliti dalam perspektif ilmu Pendidikan, sejarah, dan sosiologi pendidikan karena hal ini dipandang sebagai identifikasi dalam kajian ini.

Secara konstitusional pendidikan pesantren merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebut di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat 4 bahwa: “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasrama, pabhaja samanera, dan bentuk lainnya. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional maka dalam spektrum yang lebih luas pesantren memiliki kompleksitas permasalahan dilihat dari berbagai perspektif ilmu. Terlebih yang diteliti adalah pesantren Muhammadiyah tentu hal-hal yang terkait dengan elemen pesantren, kultur, dan budaya pendidikan merupakan kompleksitas tersendiri. Kompleksitas permasalahan pendidikan pesantren tersebut sangat luas menjadi fokus penelitian. Karenanya, lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan sistem pendidikan yang meliputi tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik, sarana dan fasilitas, proses pembelajaran, metode pembelajaran, dan manajemen. Selain pembatasan pada sistem penelitian ini juga berupaya melihat orientasi pendidikan dan implementasinya dalam program kegiatan pendidikan yang dijalankan.

### **C. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini dijabarkan dalam tiga sub focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara?
2. Bagaimana orientasi Pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara?
3. Bagaimana implementasi orientasi pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ditetapkan untuk menjelaskan:

1. Sistem pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.
2. Orientasi Pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

### 3. Implementasi orientasi Pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki signifikansi dan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bagi berbagai kalangan. *Pertama*, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Muhammadiyah terlebih kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah sebagai penyelenggara pendidikan serta Pimpinan Daerah sebagai pelaksana pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para pengelola dan pengasuh pendidikan pesantren Muhammadiyah yaitu direktur, kepala madrasah, para tenaga pendidik (ustad). *Kedua*, hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk mengetahui sistem dan orientasi pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

*Ketiga*, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para kademisi, peneliti, dan peminat masalah pendidikan pesantren, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perbandingan terkait dengan orientasi dan sistem pendidikan pesantren yang didirikan organisasi Muhammadiyah yang diorientasikan untuk mencetak kader-kader ulama, muballigh, dan da'i.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam disertasi ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pendahuluan membahas tentang latar masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, batasan istilah serta sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua diuraikan tentang landasan teori. Bab ini menguraikan tentang perspektif teoretis dan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan mengupas masalah pesantren dan Muhammadiyah yang berisi pembahasan tentang *tajdîd* dan modernisasi Islam, latar belakang pembaharuan di dunia Islam, *tajdîd* dalam perspektif Muhammadiyah, konsep pendidikan Muhammadiyah, dan pesantren Muhammadiyah dalam wacana keulamaan serta kajian terdahulu.

Selanjutnya bab ketiga memuat pembahasan tentang metodologi yang memuat uraian tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, strategi pengumpulan data, dan analisis data.

Sedangkan bab keempat kajian ini membahas sistem pendidikan Pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara. Pembahasan ini meliputi sejarah, tujuan, kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, manajemen, dan sarana prasarana. Bab ini juga akan membahas orientasi pendidikan dan implementasinya dalam pelaksanaan pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Bab kelima merupakan analisis tentang sistem dan analisis orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.

Bab keenam merupakan bab terakhir yaitu bab penutup memuat dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.